



### **Abstract**

This article discusses the distributive justice of social services by taking empirical case of the (*Rumah Susun Sederhana Sewa*) Rusunawa or public rental housing in Surakarta City. Using the theories, i.e. social services, social welfare and distributive justice, this paper examine how the government distributing fairly social services in the form of public rental housing to low-income households. In this paper, qualitative method in varian case study used to investigate real-life phenomena using multiple sources of evidence by interviewing the some key informants from the Government of Surakarta and eight tenants of rusunawa in Surakarta. Distributive justice taking place in how rusunawa benefits the renters not just in the form of houses. Judging from the dimensions of social welfare by Gilbert and Terrel (2005), the distribution of social services in the form of public rental housing still faces several obstacles in its implementation. The fulfillment of social rights to the tenants is a separate dilemma for policy makers in setting restrictions on the lease period. However, through rusunawa policy renters are not only economically lightened, but also given the same socio-economic opportunities that can strengthen their social position in society.

**Keywords:** social services; distributive justice; low-income housing; rusunawa policy.



## **Intisari**

Artikel ini membahas keadilan distributif pada pelayanan sosial dengan mengambil kasus empiris pada kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta. Menggunakan teori pelayanan sosial, kesejahteraan sosial dan keadilan distributif, makalah ini meneliti bagaimana pemerintah mendistribusikan pelayanan sosial yang adil dalam bentuk rumah susun sederhana sewa untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan varian studi kasus yang digunakan untuk menyelidiki fenomena kehidupan nyata menggunakan berbagai sumber bukti dengan mewawancarai beberapa informan kunci dari Pemerintah Kota Surakarta dan delapan penghuni rusunawa di Surakarta. Dilihat dari dimensi kesejahteraan sosial oleh Gilber dan Terrel (2005), distribusi pelayanan sosial dalam bentuk rumah sewa ini masih menemui beberapa kendala dalam implementasinya. Pemenuhan hak sosial kepada para penghuni rusunawa menjadi dilema tersendiri bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan regulasi pembatasan masa sewa. Namun, bagaimana pun juga jika dikaji dari dampak sosial dan ekonomi, kebijakan rusunawa ini tidak hanya membantu meringankan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses perumahan yang layak. Lebih dari itu, penghuni juga diberikan peluang sosial dan ekonomi untuk memperkuat posisi sosial mereka di masyarakat.

**Kata kunci:** pelayanan sosial; keadilan distributif; perumahan berpenghasilan rendah; kebijakan rusunawa.